

# **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009**

**Dewi Darmastuti**

**Dyah Setyaningrum**

**( Universitas Indonesia )**

## **Abstract**

This research aims to determine factors affecting the disclosure of social assistance expenditures. Fifty eight point thirty seven percent of Indonesian local governments has disclosed the details of the social assistance expenditures in the Notes To Financial Statements. A total of 293 samples which was selected to be tested by using logistic regression are the local governments which has been audited by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Data obtained from the local governments financial statements, audit report issued by BPK RI, Regions in Figures, the official websites of local governments, and other sources. The result of this study stated that some characteristics of local governments such as: Debt financing, intergovernmental revenue that are categorized as external environment have significant positive effect on the disclosure of social assistance expenditures, while legislature size and local financial self-sufficiency ratio have a marginal effect. Other characteristic component from internal environment such as: fiscal capacity, functional differentiation, occupational specialization, the size of local governments, administrative ages of the local governments are proved to have no effect on the disclosure of social assistance expenditures. It is concluded that the disclosure of social assistance expenditures on Indonesian local government's 2009 financial statements is highly affected by external environment factor.

**Keywords: Disclosure, Financial Statement, Local Government, Social assistance expenditures.**

## **Latar Belakang**

Penelitian tentang pengungkapan atas laporan keuangan telah banyak dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Akan tetapi penelitian yang fokus ke pengungkapan item-item yang ada dilaporan keuangan masih terbatas, terutama pada sektor pemerintahan. PP No. 24 Tahun 2005 mengklasifikasikan belanja bantuan sosial sebagai belanja operasi yang merupakan salah satu akun yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan non pemerintah dengan tidak terus-menerus dan selektif. Beberapa peraturan menjadi acuan Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi belanja bantuan sosial, seperti PP No. 24 tahun 2005, tapi peraturan tersebut belum mengatur secara rinci ketentuan tentang pengertian, kriteria, bentuk pemberian, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta pengakuan dan pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Maka dari itu, pengungkapan belanja bantuan sosial hanya didasarkan pada peraturan dan kebijakan dari masing-masing Pemerintah daerah dan itulah sebabnya mengapa masih banyak Pemerintah daerah yang belum mengungkapkan rincian belanja bantuan sosial pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal tersebut didukung oleh hasil kajian KPK terhadap kebijakan Pemerintah daerah pada periode Januari-Maret 2011, KPK menemukan beberapa kasus yang terkait masalah regulasi dan tatalaksana pengelolaan dana bantuan sosial. Dari aspek regulasi yaitu tidak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan pengungkapan dana bantuan sosial. Ketidakseragaman regulasi atas bantuan sosial menjadi faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan sosial tidak dapat dikontrol dengan baik dan dapat menyebabkan kecurangan atas dana bantuan sosial seperti korupsi.

Lesmana (2010) menjelaskan karakteristik Pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif masing-masing Pemerintah daerah. Karena ketidakseragaman pedoman terkait belanja bantuan sosial, ada tidaknya pengungkapan atas rincian belanja bantuan sosial yang disajikan oleh Pemerintah daerah diduga juga dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing Pemerintah daerah. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial, ada beberapa penelitian

sebelumnya yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan kinerja, inovasi/penerapan kebijakan, ataupun tingkat pengungkapan secara umum.

Patrick (2007) membuktikan secara empiris bahwa karakteristik Pemerintah daerah di negara bagian Pennsylvania yang mempunyai ukuran besar, budaya inovasi organisasi yang semakin besar, *intergovernmental revenue* yang rendah cenderung melakukan inovasi yang diprosikan dengan determinasi untuk mengadopsi GASB 34. Penelitian Sumarjo (2010) menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Lesmana (2010) menemukan bahwa karakteristik Pemerintah daerah yaitu umur dan rasio kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada LKPD.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Pemerintah daerah di Indonesia terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini menggabungkan beberapa karakteristik Pemerintah daerah yang diuji oleh Patrick (2007) dan Lesmana (2007) serta variabel independen lain yaitu *legislature size* yang diprosikan dengan jumlah anggota DPRD dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah. Penelitian Gilligan dan Matsusaka (2001) ditemukan bahwa *legislature size* secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap kebijakan fiskal pada Pemerintah Negara Bagian di Amerika Serikat. Selain itu, penelitian Yon (2010) membuktikan bahwa secara garis besar komponen dari kapasitas fiskal mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh tingkat PDRB.

### **Penelitian sebelumnya**

Patrick (2007) mengadopsi model Rogers (1995) dan mengambil 506 sampel Pemerintah daerah di negara bagian Pennsylvania menemukan bahwa rata-rata 46,4% Pemerintah daerah di Pennsylvania telah mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34*. Dengan melakukan analisis regresi logistik selama 1 (satu) tahun, menguji karakteristik Pemerintah daerah di Pennsylvania yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Budaya organisasi yang proksinya adalah kecenderungan Pemerintah daerah untuk berinovasi dan tanggapan terhadap konstituen,
2. Struktur organisasi yang proksinya adalah spesialisasi pekerjaan, *administrative intensity*, di ferensiasi fungsional, ketersediaan *slack resources*, ukuran (*size*) organisasi, serta
3. Lingkungan eksternal yang proksinya adalah pembiayaan utang dan intergovernmental revenue.

Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran (*size*) organisasi, kecenderungan Pemerintah daerah untuk berinovasi, dan tanggapan terhadap konstituen mempunyai hubungan positif dengan level signifikansi yang paling tinggi terhadap determinasi dalam mengadopsi GASB 34. Sedangkan karakteristik lainnya seperti spesialisasi pekerjaan, diferensiasi fungsional, *administrative intensity*, dan pembiayaan utang mempunyai hubungan positif yang moderat hingga lemah. Variabel independen yang masuk kedalam kelompok lingkungan eksternal yaitu *intergovernmental revenue* justru mempunyai hubungan negatif dan lemah terhadap terhadap determinasi dalam mengadopsi GASB 34 yang salah satunya adalah menuntut pengungkapan pelaporan keuangan yang lebih baik.

Lesmana (2010) meneliti pengaruh karakteristik dari suatu Pemerintah daerah di Indonesia terhadap praktek pengungkapan wajib. Ditemukan bahwa nilai rata-rata pengungkapan wajib Pemerintah daerah pada tahun 2007 hanya sebesar 22%, lebih kecil dari rata-rata pengungkapan wajib pada penelitian sebelumnya yaitu Mandasari (2009) dan Retnoningsih (2009) dalam Lesmana (2010) yang sebesar 52,57% dan 54,54%. Dengan menggunakan analisis regresi atas 79 sampel Pemerintah daerah di Indonesia pada periode tahun 2007 yang merupakan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun ke-3, dibuktikan bahwa dua karakteristik yaitu umur Pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD). Sedangkan karakteristik lainnya yang diuji, yaitu jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendapatan transfer, kewajiban, dan ukuran Pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada LKPD.

Penelitian Sumarjo (2010) menguji karakteristik Pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) Pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue*, terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Dengan menggunakan model regresi berganda atas 64 sampel Pemerintah daerah pada tahun 2007 menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*)

Pemerintah daerah, leverage, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Almilia dan Retrinasari (2007) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Keputusan yang cermat dan tepat menjadi faktor penting untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, yaitu prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi pada periode tertentu.

Penelitian Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan *legislature size* sebagai variabel independen dalam menguji pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal di Pemerintah daerah di Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Dengan menggunakan analisis regresi pada 48 negara bagian di Amerika Serikat selama periode 1902-1942, ditemukan bahwa *legislature size* secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap kebijakan fiskal pada Pemerintah Negara Bagian di Amerika Serikat. Anggota legislatif yang jumlahnya lebih banyak cenderung meningkatkan Belanja Pemerintah dibidang pendidikan dan infrastruktur. Kedua tipe belanja (pengeluaran) sejalan dengan *fiscal commons theory*. Ide yang menjadi dasar teori ini adalah belanja Pemerintah, secara tipikal, menguntungkan segmen tertentu dalam populasi, sedangkan pajaknya didistribusi secara luas.

Martani dan Liestiani (2010) meneliti pengaruh insentif manajemen, temuan audit, dan tipe Pemerintah daerah sebagai karakteristik terhadap tingkat pengungkapan pada Pemerintah daerah di Indonesia. Insentif manajemen yang diprosikan dengan kekayaan Pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan kompleksitas dari Pemerintah daerah. Dengan menggunakan sampel 92 LKPD yang telah diaudit oleh SAI pada tahun anggaran 2006, tahun dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali diimplementasikan, menemukan bahwa tingkat pengungkapan masih rendah yaitu sebesar 35,45%. Analisis regresi yang dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kekayaan Pemerintah daerah, kompleksitas yang diprosikan dengan jumlah populasi dari Pemerintah daerah dan jumlah temuan audit dengan tingkat pengungkapan. Sedangkan tingkat ketergantungan dan tipe dari Pemerintah daerah tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan. Nilai dari temuan audit dibuktikan memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan. Semakin tinggi nilai penyimpangan hasil temuan audit,

maka Pemerintah daerah dipandang cenderung menutupi informasi, jadi tingkat pengungkapannya menjadi rendah.

Yon (2010) meneliti tentang pengaruh kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* selama periode 2001-2007, menemukan bahwa komponen-komponen dari kapasitas fiskal yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh tingkat PDRB. Komponen Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh negatif secara signifikan atas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan komponen lain dari kapasitas fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum tidak terbukti terpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **Belanja bantuan sosial dan permasalahannya.**

Definisi belanja bantuan sosial mirip dengan definisi *social assistance benefit* yang sebagaimana diatur oleh *Government Finance Statistic Manual* (2001) yang berarti manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan terhadap resiko sosial. Oleh karena itu, bantuan sosial sering diasosiasikan dengan *social assistance*. Namun, pengertian *social assistance benefit* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat (*final consumers*) serta *social assistance benefit* tidak termasuk dana untuk bencana alam. Dana untuk bencana alam diakui sebagai beban lain-lain sedangkan penanggulangan bencana alam adalah salah satu kegiatan yang berhak atas alokasi dana bantuan sosial.

Karena masih sulitnya mendefinisikan belanja bantuan sosial, resiko terjadi salah penganggaran muncul. Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi akuntansi karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Sedangkan dalam kaitannya dengan neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan sosial di Neraca jika memenuhi definisi aset atau kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Kesalahan penganggaran dapat menyebabkan munculnya aset, namun transaksi tersebut dicatat sebagai belanja bantuan sosial sesuai dengan anggaran. Untuk kesalahan tersebut, hanya dapat dilakukan pengungkapan atas penjelasan bahwa terjadi kesalahan pengklasifikasian. Salah satu penyebab terjadi masalah tersebut adalah belum adanya pedoman yang jelas atas pos belanja bantuan sosial, baik dari segi pelaksanaan maupun akuntansinya sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, Pemerintah daerah membuat kebijakannya masing-masing atas belanja bantuan sosial didasari pada beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009.

Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur secara garis besar tentang belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial diberikan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bantuan tersebut bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur tentang bagaimana tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pencatatan, serta pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Selain itu, dalam peraturan-peraturan tersebut masih diatur bahwa salah satu penerima dana bantuan sosial adalah partai politik. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “..*Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* ”

Mulai tahun anggaran 2009, bantuan sosial kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun, jika dilihat dari sifatnya bantuan keuangan kepada partai politik kurang tepat untuk diklasifikasikan kedalam belanja bantuan sosial, karena peruntukannya tidak sesuai dengan kriteria penerima dana bantuan sosial dimana partai politik tidak mengalami resiko sosial.

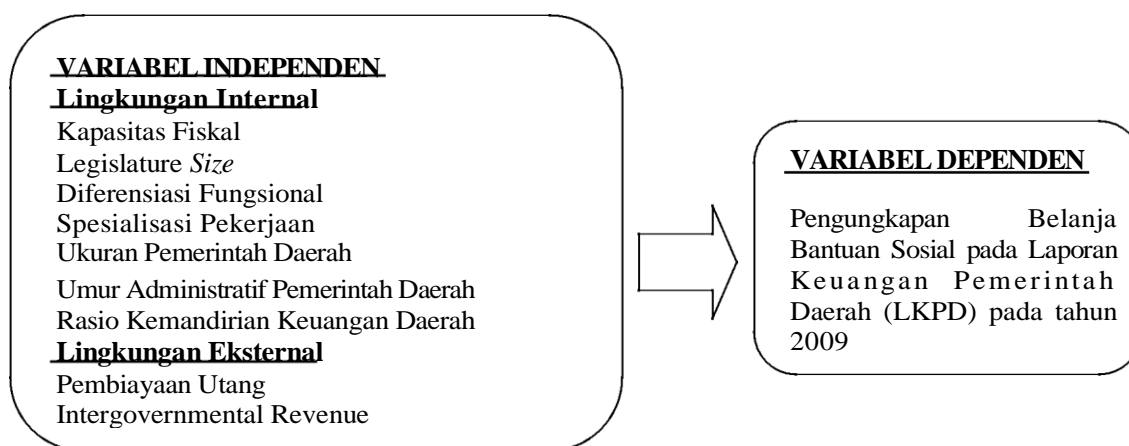
Didalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 disebutkan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah setiap tahunnya. Sedangkan Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf g Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pemberian bantuan sosial sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, itu berarti bantuan sosial tidak wajib diberikan pada setiap tahun anggaran. Adapun diberikan terus-menerus adalah dengan syarat sampai penerima dana bantuan sosial bebas dari resiko sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka disusunlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari Anggaran dan Buletin Teknis No. 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (2011) yang mengatur dengan jelas dan rinci tentang pengungkapan belanja bantuan sosial pada Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK).



## Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji faktor-faktor seperti kapasitas fiskal, *legislature size*, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ukuran Pemerintah daerah, umur administratif Pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, pembiayaan utang, dan *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Karakteristik kemudian dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1  
Kerangka Konseptual Penelitian



Penelitian Yon (2010) secara garis besar menemukan pengaruh signifikan dari komponen kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Semakin besar kapasitas fiskal akan meningkatkan kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada dari suatu daerah. Dengan demikian, logika yang sama dapat juga diterapkan pada pengungkapan yang dilakukan suatu Pemerintah daerah. Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD pada tahun 2009

Gilligan dan Matsusaka (2001) menemukan bahwa ada pengaruh positif *legislature size* terhadap kebijakan pendapatan dan pembelanjaan Pemerintah daerah. *Legislature size* di Pemerintahan Daerah di Indonesia diwakili oleh jumlah anggota badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semakin besar jumlah anggota DPRD juga dapat memberikan

tekanan yang lebih besar pada Pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap (*full disclosure*), termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

**H<sub>2</sub>:** *Legislature Size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah. Pada Pemerintah daerah di Indonesia, fungsi departemen fungsional sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Pada penelitian Lesmana (2010) tidak terbukti adanya pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Pemerintah daerah di Indonesia. Damanpour dalam Patrick (2007) berpendapat diferensiasi fungsional memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan inovasi. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi pada suatu Pemerintah daerah, akan semakin besar pemenuhan pengungkapan termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

**H<sub>3</sub>:** Diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah yang memiliki administrator yang memiliki spesialisasi pekerjaan yang ditunjukkan dengan keterampilan dan pelatihan yang tinggi khususnya di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* dibanding dengan Pemerintah daerah yang administratornya memiliki keterampilan dan pelatihan yang rendah. Kepala daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Dengan logika yang sama, Kepala daerah dan Wakilnya yang berlatar belakang pendidikan dibidang Ekonomi, termasuk Akuntansi, akan cenderung

menyelenggarakan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lebih baik termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Maka, hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H4: Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Arcay dan Vazquez (2005) juga menemukan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Spanyol. Dalam sektor pemerintahan, Lesmana (2010) menemukan bahwa ukuran Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akan tetapi, Sumarjo (2010) menguji pengaruh ukuran Pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan dan menemukan bahwa ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meski pengaruh tidak terlalu signifikan. Semakin besar ukuran Pemerintah daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007 dalam Sumarjo, 2010). Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baiknya kinerja suatu Pemerintah daerah diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan rinci an atas Belanja bantuan sosial.

H5: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009

Umur administratif Pemerintah daerah, yaitu tahun dibentuknya suatu Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentuk daerah tersebut, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian Lesmana (2010) membuktikan bahwa semakin lama suatu Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya, semakin besar tingkat pengungkapan yang disajikan oleh Pemerintah daerah tersebut.

Semakin lama suatu Pemerintah daerah terbentuk, maka Pemerintah daerah tersebut semakin berpengalaman dan pengalaman tersebut menjadi keunggulan dari Pemerintah dalam menjalankan sistem administrasinya termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6: Umur Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Lesmana (2010) juga menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah daerah untuk tetap dapat menjalankan pemerintahannya tanpa adanya dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan tanpa pembiayaan utang dari pihak luar. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki suatu Pemerintah daerah. Didalam PSAP No. 02 dijelaskan bahwa PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah yang sebagian besar dibayarkan oleh masyarakat. Tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi, termasuk dalam hal pengungkapan terhadap rincian belanja bantuan sosial. Maka, hipotesis penelitian yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

**H7:** Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Lesmana (2010) menguji pengaruh kewajiban (hutang Pemerintah daerah) terhadap tingkat pengungkapan wajib. Penelitian tersebut tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kewajiban dengan tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Akan tetapi, Patrick (2007) yang menguji hubungan variabel pembiayaan utang dengan determinasi dalam mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* menemukan adanya pengaruh pembiayaan utang terhadap inovasi. Hal ini disebabkan karena organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar yang Berlaku Umum.

Kepatuhan terhadap standar serta pengungkapan yang memadai adalah informasi penting bagi kreditor karena dengan informasi tersebut berguna untuk meyakinkan kreditor atas penilaian yang akurat dari kemampuan debitor dalam membayar kewajibannya. Selain itu, kreditor akan melakukan pengawasan kepada debitor untuk memastikan bahwa debitor dapat membayarkan kewajibannya di masa yang ditentukan. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

**H8:** Pembiayaan Utang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai transfer dana dari Pemerintah pusat dan Pemerintah federal kepada Pemerintah daerah. Dalam penelitiannya, Patrick (2007) menemukan adanya pengaruh negatif *intergovernmental revenue* terhadap inovasi. Pada kenyataannya, Pemerintah daerah di Pennsylvania yang mempunyai tingkat *intergovernmental revenue* yang lebih rendah cenderung mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) 34 daripada Pemerintah daerah dengan tingkat *intergovernmental revenue* yang lebih besar.

Di Indonesia, Martani dan Liestiani (2010) mengadopsi *intergovernmental revenue* menjadi variabel tingkat ketergantungan, yang merupakan rasio dana alokasi umum pada dana perimbangan dari Pemerintah pusat. Penelitian Martani dan Liestiani (2010) tidak menemukan adanya hubungan antara tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana dari Pemerintah pusat dengan tingkat pengungkapan. Sedangkan, Suhardjanto (2010) dalam Sumarjo (2010) menemukan adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap kesesuaian pengungkapan wajib Pemerintah daerah. Sumarjo (2010) memproksikan *intergovernmental revenue* dengan rasio dana perimbangan.

Dalam hal pembelanjaan dana perimbangan, Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Meskipun Pemerintah pusat sebagai penyedia dana perimbangan tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari Pemerintah daerah, tapi Pemerintah pusat akan meminta suatu bentuk akuntabilitas dari Pemerintah daerah (Patrick, 2007). Pemerintah daerah dapat melaksanakan akuntabilitasnya dengan melakukan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lengkap, termasuk pengungkapan rincian atas belanja bantuan sosial. Dari penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

**H<sub>9</sub>:** *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009.

## **Metodologi Penelitian**

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2009, kecuali Pemerintah daerah yang menurut Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Digunakan sampel penelitian

pada tahun 2009 karena tahun 2009 dianggap tahun yang mewakili tahun-tahun sebelumnya dimana pedoman terkait belanja bantuan sosial masih belum jelas. Tahun 2009 juga merupakan tahun terbaru dari penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada masa penelitian berlangsung. Dengan metode *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Proses Seleksi Sampel**

Kriteria 1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2009 di Indonesia	24
a	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi pada tahun 2009 di Indonesia	33
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota pada tahun 2009 di Indonesia	91
b	Daerah pemekaran belum diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan	20
c	Daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dalam proses	4
d	Daerah yang pemeriksaannya ditunda karena force majore (bencana alam banjir Wasior)	1
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota pada tahun 2009 di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK	66
Kriteria 2	Tidak memiliki data yang lengkap untuk pengukuran seluruh variabel, yaitu:	
a	Tidak menyajikan data jumlah SKPD sebagai entitas akuntansi pada LKPD atau pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK atau pada situs resmi Pemda	119
b	Tidak menyajikan data Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah dan Wakilnya pada Daerah Dalam Angka ataupun situs resmi Pemda.	48
c	Tidak menyajikan data jumlah anggota DPRD pada Daerah Dalam Angka ataupun situs resmi Pemda.	4
Sampel Terkumpul		95

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 yang telah diperiksa dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), buku Daerah Dalam Angka (DDA) masing-masing Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), pada situs resmi masing-masing Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang pembentukan daerah masing-masing Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lainnya. Dengan menggunakan regresi logistik, maka model yang digunakan dalam penelitian untuk menguji kesembilan hipotesis adalah:

$$\ln[\text{pDISC.BANSOS}/(1-\text{pDISC.BANSOS})] = \beta_0 + \beta_1\text{FISCAP} + \beta_2\text{DPRD} + \beta_3\text{SKPD} + \beta_4\text{SPES} + \beta_5\ln[\text{ASSET}] + \beta_6\text{AGES} + \beta_7\text{PAD} + \beta_8\text{DEBTFIN} + \beta_9\text{INTREV} + e$$

**Tabel 2**  
**Deskripsi Variabel Dalam Model**

Variabel	Deskripsi	Operasional Variabel
DISC. BANSOS	Variabel kategorik/kualitatif/ <i>dummy</i> ; yaitu ada tidaknya pengungkapan atas belanja bantuan sosial pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	1 = mengungkapkan, 0 = tidak mengungkapkan.
$\beta_0$	<i>Intercept</i> persamaan regresi	-
$\beta_1 - \beta_9$	Koefisien regresi variabel independen	-
FISCAP	Kapasitas Fiskal	Berdasarkan indeks kapasitas fiskal Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/Pmk.07/2010 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
DPRD	<i>Legislature size</i>	Jumlah anggota DPRD
SKPD	Diferensiasi fungsional	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi
SPES	Variabel kategorik/kualitatif/ <i>dummy</i> ; yaitu latar belakang Kepala/ Wakil Kepala daerah.	1 = berlatar belakang dibidang ekonomi, 0 = berlatar belakang selain bidang ekonomi
LN ASSET	Ukuran Pemerintah daerah	natural logaritma dari total keseluruhan aset di neraca
AGES	Umur administratif Pemerintah daerah	tahun sejak terbitnya Undang-Undang pembentukan Pemerintah daerah yang bersangkutan
PAD	Rasio Kemandirian Keuangan daerah	Total PAD / (Total Pendapatan Selain PAD + Total Kewajiban) x 100%
DEBTFIN	Pembiayaan Utang	Total Kewajiban / Total Ekuitas x 100%
INTREV	<i>Intergovernmental revenue</i>	Total Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat / Total Pendapatan x 100%
e	Koefisien <i>Error</i>	-

## Hasil Penelitian

Pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia sampai dengan tahun 2009, rincian belanja bantuan sosial pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) didasarkan pada penerima atau kelompok penerima dana bantuan sosial dan jenis kegiatan utama dari alokasi belanja bantuan sosial. Berdasarkan kriteria bahwa pengungkapan harus secara lengkap dari total angka keseluruhan belanja

bantuan sosial yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebanyak 272 dari 466 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau 58,37% Pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK pada tahun 2009 yang telah mengungkapkan rincian atas belanja bantuan sosial.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPRD	94	20	54	35.39	10.138
SKPD	94	18	203	52.74	27.391
Asset	94	31,554,748,040	31,359,288,067,199	1,851,606,779,902	2,448,546,956,910
AGES	94	1	59	36.44	23.060
PAD	94	.5257	73.2613	7.705959	7.6074176
DEBTFIN	94	0.0000	15.9163	0.771386	1.5607042
INTREV	94	0.0000	97.5341	82.893871	8.7735618

Sumber: telah diolah kembali

Keterangan:

DPRD: *Legislature size*

SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi

Asset: *Size* Pemerintah daerah

AGES: Umur administratif Pemerintah daerah

PAD: Rasio kemandirian keuangan daerah

DEBTFIN: Pembiayaan Utang

INTREV: *Intergovernmental revenue*

**Tabel 4**

**Tabel Frekuensi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, Kapasitas Fiskal, Spesialisasi Pekerjaan**

	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
<b>PENGUNGKAPAN BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>		
YA	182	61.9
TIDAK	112	38.1
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>100</b>
<b>KAPASITAS FISKAL</b>		
TIDAK TINGGI (RENDAH & SEDANG)	213	72.4
TINGGI (TINGGI & SANGAT TINGGI)	81	27.6
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>100</b>
<b>SPELIALISASI PEKERJAAN</b>		
EKONOMI	123	41.8
BUKAN EKONOMI	171	58.2
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>100</b>

Sumber: telah diolah kembali



Berdasarkan statistik deskriptif dan tabel frekuensi, dapat dilihat bahwa variasi data pada variabel-variabel yang diuji masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari standar deviasi yang tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya. Hanya variabel *intergovernmental revenue* (INTREV) yang memiliki standar deviasi cukup rendah yang berarti sebaran datanya cukup normal.

Nilai rata-rata pada variabel independen umur administratif Pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah 36 yang berarti sistem administrasi rata-rata Pemerintah daerah di Indonesia sudah berjalan selama 36 tahun. Nilai rata-rata pada variabel independen PAD dalam penelitian ini adalah sekitar 7,7%. Itu berarti, rata-rata Pemerintah daerah di Indonesia membiayai 7,7% operasionalnya dengan PAD dan 92,3% dibiayai oleh pendapatan selain PAD dan hutang. Nilai rata-rata (*mean*) dari pembiayaan utang adalah sekitar 0,77% berarti sumber pembiayaan aset pada Pemerintah daerah di Indonesia hanya sekitar 0,77% yang berasal dari hutang dari pihak luar. Nilai rata-rata pada variabel *intergovernmental revenue* dalam penelitian ini adalah 82,63%. Artinya, dari keseluruhan pendapatan rata-rata Pemerintah Daerah, pendapatan tersebut terdiri dari 82,63% dana perimbangan dan 17,37% oleh pendapatan selain dana perimbangan dari Pemerintah pusat. Nilai rata-rata anggota DPRD adalah 35, nilai rata-rata SKPD sebanyak 53, dan ukuran Pemerintah daerah adalah 1,851,606,779,902.

Berdasarkan tabel 4 Pemerintah daerah yang mengungkapkan rincian belanja bantuan sosial di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebanyak 183 Pemerintah daerah atau sebesar 62% dari Pemerintah daerah yang di observasi. data tersebut juga memperlihatkan hanya 27,6% sampel Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan terdapat 41,7% yang mempunyai Kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi, termasuk akuntansi.

### Pre-analysis screening

*Outlier* dapat mendistorsi model statistik dan menyebabkan nilai residual yang sangat besar. Karena *outlier* menyebabkan nilai residual yang besar, maka *outlier* harus deteksi, lalu dibuang atau ditransformasi. Burns et. al (2008) menggunakan *casewise list* untuk mengidentifikasi *outlier*, dengan data tersebut didapatkan Kabupaten Gunung Kidul terdeteksi sebagai *outlier*. Oleh karena itu, Kabupaten Gunung kidul dikeluarkan dari data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

**Tabel 5**  
**Pearson Correlations**

	DPRD	SKPD	SPES	Ln Asset	AGES	PAD	DEBTFIN	INTREV	FISCAP
DPRD	1	0.181	0.003	0.483	0.514	0.277	-0.071	-0.328	-0.463
SKPD		1	0.033	0.285	0.182	0.035	-0.051	-0.034	-0.167
SPES			1	0.031	-0.041	-0.061	-0.008	0.038	0.033
Ln Asset				1	0.462	0.335	-0.311	-0.219	-0.034
AGES					1	0.223	-0.196	-0.104	-0.283
PAD						1	-0.136	-0.517	0.020
DEBTFIN							1	0.056	-0.007
INTREV								1	0.004
FISCAP									1

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dikarenakan pearson correlation variabel independen dengan variabel independen lainnya  $<0,80$ .

**Pengujian Hipotesis Penelitian**

**Tabel 6**  
**Model Summa**

Block	-2 log likelihood	Nagelkerke R Square	Hosmer & Lemeshow Test	Overall %
0	390.743			
1	372.750	0.081	0.243	62.9

Penurunan nilai *-2 log likelihood* dari *block 0* ke *block 1* sebesar 17,993 dan *p-value* pada Hosmer & Lemeshow Test yang nilainya melebihi 0,05 menunjukkan bahwa penambahan variabel independen memberikan pengaruh kepada model sehingga model dapat dinyatakan fit dan model telah dapat menjelaskan data empiris. Secara keseluruhan, tingkat akurasi model adalah 62,9%.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Nagelkerke R Square dari penelitian ini adalah sebesar 0,081. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 8,1% dari variabel dependennya. Sedangkan, sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang di luar model penelitian. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Tabel 7**  
**Variable in The Equation**

	<b>B</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>	<b><math>\alpha</math></b>
<b>FISCAP</b>	<b>0.389</b>	<b>0.245</b>	<b>Tidak Signifikan</b>	<b>-</b>
<b>DPRD</b>	<b>0.031</b>	<b>0.084</b>	<b>Signifikan</b>	<b><math>\alpha=10\%</math></b>
<b>SKPD</b>	<b>-0.002</b>	<b>0.711</b>	<b>Tidak signifikan</b>	<b>-</b>
<b>SPES</b>	<b>-0.066</b>	<b>0.794</b>	<b>Tidak signifikan</b>	<b>-</b>
<b>Ln Asset</b>	<b>0.088</b>	<b>0.688</b>	<b>Tidak signifikan</b>	<b>-</b>
<b>AGES</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Tidak signifikan</b>	<b>-</b>
<b>PAD</b>	<b>0.056</b>	<b>0.074</b>	<b>Signifikan</b>	<b><math>\alpha=10\%</math></b>
<b>P. UTANG</b>	<b>0.276</b>	<b>0.022</b>	<b>Signifikan</b>	<b><math>\alpha=5\%</math></b>
<b>INTREV</b>	<b>0.049</b>	<b>0.040</b>	<b>Signifikan</b>	<b><math>\alpha=5\%</math></b>
<b>Constant</b>	<b>-7.777</b>	<b>0.218</b>		

Sumber: telah diolah kembali

Dari hasil pengujian kesembilan hipotesis, dibuktikan bahwa karakteristik yang digolongkan dalam lingkungan eksternal yaitu pembiayaan utang (DEBTFIN) dan *intergovernmental revenue* (INTREV) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial ( $\alpha=5\%$ ). Komponen karakteristik dari lingkungan internal yaitu legislature size (DPRD) dan rasio kemandirian keuangan daerah (PAD) mempunyai pengaruh marjinal terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial ( $\alpha=10\%$ ). Sedangkan, karakteristik dari lingkungan internal lainnya seperti kapasitas fiskal (FISCAP), diferensiasi fungsional (SKPD), spesialisasi pekerjaan (SPES), ukuran Pemerintah daerah (Ln Asset), dan umur Pemerintah daerah (AGES) tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, pengungkapan belanja bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dimana Pemerintah daerah akan cenderung untuk mengungkapkan rincian belanja bantuan sosial pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jika ada tuntutan dan pengawasan dari kreditor dan dari Pemerintah pusat sebagai pemberi dana perimbangan. Selain itu, peran dan pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rakyat juga terbukti berpengaruh pada pengungkapan belanja bantuan sosial oleh Pemerintah daerah, meskipun pengaruhnya marjinal. Pengawasan rakyat terbukti dari berpengaruh dilihat hasil signifikansi pada tingkat kepercayaan 90% dari rasio kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sumber terbesarnya adalah dari pendapatan retribusi dan pajak dari rakyat, terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh beberapa karakteristik Pemerintah daerah yang dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap pengungkapan rincian belanja bantuan sosial di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan populasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2009, hasilnya adalah dibuktikan bahwa ada 2 (dua) dari 9 variabel independen yang diuji, yaitu pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue* yang termasuk dalam kelompok lingkungan eksternal memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Lingkungan internal seperti jumlah anggota DPRD dan rasio kemandirian keuangan daerah mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial meski hanya bersifat marginal. Sedangkan variabel lainnya tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah pengawasan dari lingkungan eksternal adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap praktik pengungkapan belanja bantuan sosial. Untuk selanjutnya disarankan untuk meneliti perbandingan pengungkapan belanja bantuan sosial sebelum disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 dan sesudah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011.

## Daftar Referensi

- Arcay, R.B., & Vázquez, F.M. (2005). Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain. *Advances in Accounting*. Vol. 21: 299-331.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Biro Pusat Statistik Indonesia. (2010). Daerah Dalam Angka.
- Burns, Robert., & Burns, Richard. (2008). *Business Research Methods and Statistics Using SPSS*. SAGE Publications Ltd.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giligan, Thomas W., & Matsusaka, John G. (2001). Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. *National Tax Journal*. Vol. 54: 57-82.
- Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometrics: 5th Edition*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- International Monetary Fund. (2001). *Government Financial Statistics Manual*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2011). Buletin Teknis SAP No. 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
- [Kompas.com](http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan.Dikorupsi). (2011). Dana Bantuan Sosial Rawan Korupsi. <<http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan.Dikorupsi>>
- Lesmana, Sigit I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Martani, Dwi. & Liestiani, Annisa. (2010). Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. *Conference Proceedings: Asian Academic Accounting Association*.
- Patrick, Patricia A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT 3266180).
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of innovations* (4th ed.). New York: The Free Press.
- Suhardjanto, Djoko., & Miranti, Laras. (2009). Indonesian Environmental Reporting Index Dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol. 13, No. 1.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yon, Hendrik. (2010). Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

**Dewi Darmastuti**

Komplek BPK V Blok B-12 Gandul, Cinere  
Depok 16512  
Mobile : 087878646685  
Phone : 021-7540562  
Email : [dewidarmastuti@ymail.com](mailto:dewidarmastuti@ymail.com)  
[dewiforpresident@gmail.com](mailto:dewiforpresident@gmail.com)

---

***WORKING EXPERIENCE***

1. As Associates 1 in KPMG, a certified Public Accountant Firm, already signed contract and will enroll in June 2012

Main Objectives: Conducting Audit of Client's Financial Statements.

2. As a Treasury Staff (Cashier) in PT Truba Jaya Engineering, October 2008 - September 2010.

Main Objectives: To make sure that payment to supplier or vendor transaction work well and maintain the updated report of payable and bank reconciliation.

Deal with bank reconciliation, receive and organize verified invoices from Accounting Department, make daily financial transactions, provide payable of work order or purchase order report every week (to be used for vendor's payment planning), maintain relationship with supplier/vendor/bank staff related to Truba's payment transactions.

***ORGANIZATIONAL EXPERIENCES***

1. A Public Relations, Publication, and Documentation Committee of Diary (a Girls' event) in State Polytechnic of Jakarta (2007)
2. A Secretary of TOEFL Preparation Test held by Polytechnic English Club (PEC) in State Polytechnic of Jakarta (2006)
3. A member of Choir Club *Grazia Vocalista* of 34 Senior High School (2004-2005)
4. A Decoration Committee of Yellow Submarine, Art Exhibition Contest of All Senior High in D K I Jakarta, held by 34 Senior High School (2004)
5. A Committee in Indonesia's independence day celebration held by Komplek BPK V (2004)
6. Class Representative in 85 Junior High School (2000)

## ***EDUCATIONAL EXPERIENCES***

### **FORMAL**

1. University of Indonesia Majoring in Accounting, Depok, 2009 to 2011 (cummulative GPA: 3,20 out of 4,00).
2. State Polytechnic of Jakarta Majoring in Accounting, Depok, 2005 to 2008 (cummulative GPA: 3,37 out of 4,00).
3. 34 senior high school (Natural Science Program), Pondok Labu, South Jakarta, 2002 to 2005 (National Exam Score: 25,16 of 30,00).
4. 85 Junior high school, Pondok Labu, South Jakarta, 1999 to 2002
5. Gandul 01 Elementary School, Depok, 1993 to 1999

### ***INFORMAL***

### **JOB TRAINING**

1. Job Training in Supreme Audit Board (BPK) in Accounting Department (2007)

Input DIPA, SPM, SSBP data; Verify financial statement; Accept ADK and print the financial statement; Accept dan print the delivery regristration documents; Verify the municipal level financial statement; Do the financial statement and Asset report reconciliation and also make the Adjusment memo.

**Training's Average Score:** 90 from 100

2. Job Training in S.Mannan, Sofwan, Adnan & Associate Registered Public Accountant, as a member of Kartika Chandra Company audit team (2008)

Check the bank reconciliation, check the cut off of cash transactions, make the corrections jurnal, make the cash & bank working paper, check the A/R schedule, inquiry with the A/R staff, check the allowance account, make the corrections jurnal and send confirmation to the third parties, make the A/R working paper, make the working trial balance, review A/R working paper, report the working paper and make audit report draft.

**Training's Average Score:** 88 from 100



## Contract, Part Time Experience, Achievements, Scholarship, Courses, and Seminar & Trainings

### Contract

As a Business Process Control (BPC) Assistant in PT Sandoz Indonesia, 16 Februari 2012 – **now**

Main Objectives: To make the operations of all key control process in Sandoz effective based on the Novartis Financial Controls Manual (NFCM)

Make sure that the Standard Operating Procedure (SOP) of Sandoz aligns with Novartis Financial Controls Manual (NFCM), completing the Master Test Plan (MTP), conducting operational audit (purchasing cycle); inquiry with the control owner of a process, collecting evidences, etc.

### Part Time

1. Research assistance in Hibah Riset Awal Tahun UI “*Study of Social Assistance Expenditures Disclosure on the Financial Statement of Local Government and Ministry/Institution in Indonesia.*” by Mrs. Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M. and Mrs. Nanda Ayu Wijayanti, S.E., MBA, CPMA held by Directorate of Research and Community Service University of Indonesia (2011).
2. A 6<sup>th</sup> grade elementary school student private tutor. Tutoring all subject including science and social study, especially math for national examination (UN) (2008).

### Achievements

1. Runner Up of professional category of I-YEN (*Indonesia Youth Employment Network*) program (among universities in D K I Jakarta) held by the Ministry of Manpower and Transmigration of Indonesia (2007)
2. Semifinalist in *Accounting Debate Competition* 2007 held by State Polytechnic of Jakarta (2007)
3. First Place Winner of Speech Contest “*the role of young generation in globalization era*” in PORSEN I held by 34 Senior High School (2003)

### Scholarship

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) scholarship from State Polytechnic of Jakarta from the 3<sup>rd</sup> semester until 5<sup>th</sup> semester.

---

English Course from First Step to Communicate in English Levels to Advance Levels in LIA  
Fatmawati (2000-2005)

#### Seminars & Trainings

1. Participant of scientific writing workshop held by Management Research Center, Department of Management FEUI: *Urgensi Pengembangan Jurnal Bereputasi Internasional di Indonesia*. (2011)
2. Participant of an Entrepreneurship Workshop and Training held by FEUI: *Mastermind* (2011)
3. Participant of Indonesia Accounting Fair 12 Training and Seminar held by FEUI: *Implementing SAK ETAP*. (2011)
4. Participant of Audit Seminar, Training, and Company Visit held by FEUI: *Understanding The New Roles of Internal Audit in Detecting & Preventing Fraud*. (20 10)
5. Participant of Forex seminar held by FEUI: *Forex dalam Dunia Bisnis dan Investasi* (2010)
6. Participant of employment seminar held by State Polytechnic of Jakarta (2007)
7. Participant of an Islamic Accounting seminar held by Bank of Indonesia: *Islamic Accounting in Indonesia* (2007)
8. participant of Basic Leadership Training (*Latihan Dasar Kepemimpinan*) held by 85 Junior High School (2000)

#### **QUALIFICATIONS**

1. Ms Office applications; Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Access.
2. Accounting program; MYOB.
3. Statistics program: SPSS.

#### **REFERENCES**

1. Dyah Setyaningrum, S.E., Ak, M.S.M, a lecturer and researcher of **Universitas Indonesia**
2. Bambang Aryanto, Head of Treasury Department of **PT Truba Jaya Engineering**
3. Erni Suryawati, BPC Manager & Compliance Officer of **PT Sandoz Indonesia**


*E-mail / contact number will be available upon request*

## ***PERSONAL DATA***

PLACE / DATE OF BIRTH : Jakarta, 21 September 1987  
NATIONALITY : Indonesia  
RELIGION : Islam  
SEX : Female  
STATUS : Single  
HOBBY : Tutoring, writing, drawing, swimming, biking,  
traveling, designing, etc.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### KETERANGAN PERORANGAN

	Nama Lengkap	Dyah Setyaningrum S.E., M.S.M	
	NIP	197805072010122001	
	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda Tk. I / III/b	
	Tanggal Lahir / Umur	7 Mei 1978 / 34 tahun	
	Tempat Lahir	Banyuwangi	
	Jenis Kelamin	Wanita	
	Agama	Islam	
	Status Pernikahan	Menikah	
	Alamat Rumah	Grand Depok City Puri Insani II Blok B2/2, Rt. 07 Rw. 04 Jatimulya-Sukmajaya Depok	
10.	Kode Pos	16413	
11.	No. Telepon	021-87926844	
12.	No. HP	0818174505	
13.	E-mail	dystia_01@yahoo.com, dsetyani@ui.ac.id	

### PENDIDIKAN DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

NO.	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT
1	SDN Muhammadiyah 6		1989	Genteng-Banyuwangi
2	SMPN I		1992	Genteng-Banyuwangi
3	SMAN I	A1	1995	Genteng-Banyuwangi
				Depok
				Depok

### PENELITIAN

NO.	KEGIATAN	SERBITERANAN	KETERANGAN
1	Studi pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di Indonesia	Hibah Awal RUUI 2011	Ketua Peneliti
2	Analisis Kualitas Audit BPK dan Pengukuran Tingkat Ketaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hibah Madya RUUI 2012	Ketua Peneliti

## PUBLIKASI

NO.	JUDUL	PERAN (Jmlah Anggota)	TAHUN	KETERANGAN
1	garuh Mekanisme Corporate Governance terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan di Indonesia	Peneliti Tunggal	2005	huat dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 2 - Nomor 2, Desember 2005, ISSN: 1829-8494, Hal. 73 - 101
2	Impact of Student Perceptions and Expectations on Student's Results : An Empirical Study in Teaching the Introductory Accounting Course in the	Penulis Kedua, ditulis bersama Elvia Sunityo Shauki	2006	huat dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 3 - Nomor 2, Desember 2006, ISSN: 1829-8494, Hal. 143 - 167

Jakarta, 13 Juni 2012  
Yang membuat,

Dyah Setyaningrum

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Dewi Darmastuti

Alamat: Komplek BPK V Blok B-12 Gandul Cinere Depok

Nama: Dyah Setyaningrum

Alamat: Grand Depok City Puri Insani II B2/2 Depok

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang kami kirimkan dengan judul:

**“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial  
Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009”**

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari artikel orang lain. Artikel ini belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan kepada panitia SNA XV Banjarmasin untuk digandakan/diperbanyak dan disebarluaskan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami

Dewi Darmastuti

Dyah Setyaningrum